

PUTUSAN KONTROVERSI MK DISOAL

Jokowi Berpotensi Dimakzulkan

Medan, MIMBAR - Kegaduhan politik akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres, bisa berdampak serius ke Presiden Jokowi.

Demikian disampaikan pendiri dan CEO Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah PhD (56). Ia menyatakan, bukan tidak mungkin bagi parlemen, memakzulkan (impeachment) Jokowi. Sebab, empat faktor yang selama ini menjadi jalan bagi parlemen memakzulkan seoraang presiden, bukan tidak tersedia. Menurut konsultan politik terkemuka kelahiran Cibarusah, Bekasi ini, saat diwawancara dalam

■ Bersambung ke Hal 11

Keputusan MK Bisa Dibatalkan



Kurnia Ramadhana. (net)

PROSES pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto, berpotensi gagal, jika MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) menyimpulkan ada pelanggaran kode etik oleh hakim MK, dalam memutuskan perkara

uji materi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Secara teoritis, itu dapat terjadi, apabila ada yang kemudian menjadikan putusan MKMK tersebut, sebagai alas permohonan baru untuk membatalkan putusan MK Nomor 90.

■ Bersambung ke Hal 11

MKMK Diminta Pecat Anwar Usman

SEDIKITNYA, 16 guru besar dan pengajar HTN (hukum tata negara), seluruhnya bergelar doktor atau magister hukum, melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Atas panggilan profesi, para ahli hukum itu tidak bisa berdiam diri tanpa bertindak, ketika menilai Anwar terlibat konflik kepentingan dalam memutuskan



Titi Angraini.

syarat batas usia minimal capres cawapres, sehingga para mereka meminta MKMK yang dipimpin Prof Jimly Ashshididqie, menjatuhkan hukuman berat berupa pemecatan.

"Kami berharap putusan MKMK bisa menyelamatkan MK dengan mengeluarkan saudara Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi," ujar Kurnia Ramadhana, kuasa hukum 16 akademisi tersebut, Kamis (26/10).

■ Bersambung ke Hal 11



Pakar Jelaskan 3 Poin Soal Potensi Pandemi Cacar Monyet. (Liputan6.com)

Kasus Cacar Monyet di Indonesia Meningkat

GEJALA dan PENCEGAHAN CACAR MONYET

- GEJALA**
- Demam
 - Sakit Kepala
 - Pembengkakan Kelenjar Getah Bening
 - Nyeri Punggung
 - Nyeri Otot
 - Kelelahan
 - Ruam Mulai dari Wajah ke Bagian Tubuh Lain

- DIAGNOSIS**
- Lewat Pemeriksaan Laboratorium
- PENCEGAHAN**
- Bisa Dicegah & Sembuh dengan Sendirinya dalam 14-21 Hari.
- PENGOBATAN**
- Tidak Ada Pengobatan Khusus
 - Pengobatan Simptomatik & Suportif Dapat Diberikan untuk Meringankan Keluhan

- PENCEGAHAN**
- Perilaku Hidup Bersih & Sehat
 - Cuci Tangan dengan Sabun
 - Hindari Kontak Langsung dengan Tikus/Primata
 - Batasi Paparan Langsung dengan Darah/Daging yang Tidak Dimasak dengan Baik



Medan, MIMBAR - Infeksi virus Mpox (juga dikenal sebagai cacar monyet) menjadi perhatian di banyak belahan dunia, termasuk Asia Tenggara. Penyakit yang mirip dengan cacar ini disebabkan oleh virus yang ditularkan dari hewan ke manusia dan dapat menimbulkan gejala ringan hingga berat.

Mpox dapat menular dari manusia ke manusia dan tidak hanya dari hewan ke manusia. Cepatnya penyebaran Mpox secara global dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingginya jumlah orang yang bepergian, perdagangan internasional hewan seperti monyet, munculnya jalur penularan baru dari manusia ke manusia, khususnya

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

15 RABIUL AKHIR 1445 H

Subuh : 04:53 WIB
Zuhur : 12:12 WIB
Ashar : 15:31 WIB

Maghrib : 18:12 WIB
Isya : 19:22 WIB

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

Hanya Sekejap

Oleh : Dr.H. Sori Monang, Rkt an-Nadwi M.Th

DAN milik Allah (segala) yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat (lagi). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. An Nahl 77).

Manusia mungkin merasa kiamat itu masih sangat jauh. Padahal Nabi mengisyaratkan sangat dekat, ibarat jarak jari telunjuk dengan jari tengah. Nabi Muhammad SAW pernah mengisyaratkan bahwa jarak

■ Bersambung ke Hal 11

PDIP Terkait Pencalonan Gibran Diusung KIM

Kami Beri Privilege Besar ke Jokowi, Tapi Kami Ditinggalkan

SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan partainya telah memberi keistimewaan yang begitu besar kepada Presiden Joko Widodo, namun kini ditinggalkan. Hasto mengatakan PDIP saat ini dalam suasana sedih.

"Ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami

ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi," ujar Hasto melalui keterangan tertulis, Ahad (29/10/2023).

■ Bersambung ke Hal 11



Dewas KPK Didesak Panggil Ulang Firli

Jakarta, MIMBAR - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK segera memanggil kembali Firli Bahuri dan memastikan kehadirannya.

Melalui keterangan tertulis, Yudi meminta Dewas KPK bersikap tegas kepada Ketua KPK itu agar tidak memperlambat pengusutan dugaan pelanggaran etik terkait pertemuannya dengan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan dugaan pemerasan.

"Segera panggil Firli lagi secepatnya dan pastikan dia hadir," ujarnya, Sabtu (28/10).

Yudi juga menyayangkan sikap Firli yang meminta pengunduran jadwal

■ Bersambung ke Hal 11



■ Ayo tindakanjuti
■ Hehehe...

Lima Relawan MER-C Hilang Kontak di Gaza

Gaza, MIMBAR Kepala Presidium MER-C, Dr Sarbini Abdul Murad menyebut lima orang relawan dari Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) hilang kontak di wilayah Gaza. Para relawan ini tak bisa dihubungi sejak Jumat (27/10) waktu setempat.

"Jadi total ada lima orang yang tidak bisa dihubungi," katanya, Ahad (29/10).

Sarbini menyebutkan, sebelum tak bisa dihubungi, tiga relawan diketahui berada di sekitar rumah sakit yang ada di wilayah Gaza, sementara dua orang lainnya tidak diketahui pasti lokasi persisnya hingga tak dapat dikontak sama sekali.

Sarbini mengaku, MER-C telah mencoba mengontak semua jaringannya yang ada di Jalur Gaza, namun hasilnya nihil. Semua orang yang mereka kontak tak dapat dihubungi. "Kami terima informasi, Bu Menlu (Menteri Luar Negeri) juga tak bisa hubungi relawan MER-C di sana," kata dia.

Sementara itu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha mengakui masih sulit melakukan kontak dengan

relawan-relawan yang ada di Jalur Gaza.

Dia menyebut Kementerian Luar Negeri, KBRI Cairo, dan KBRI Amman terus bersama mencoba melakukan kontak, meski hasilnya nihil.

"Diketahui, Israel melakukan serangan udara pada 27 Oktober malam, yang antara lain merusak jaringan komunikasi di Gaza," katanya.

KEGAGALAN BESAR

Terpisah, Presiden Komite Palang Merah Internasional (ICRC), Mirjana Spoljaric menyebut perang yang tengah terjadi antara Palestina dan Israel di Gaza adalah kegagalan besar. Hal ini disampaikan Spoljaric dalam sebuah pernyataan, Sabtu (28/10) waktu setempat. "Ini adalah kegagalan besar yang tidak boleh ditoleransi dunia," kata dia, mengutip CNN.

Dia menyerukan agar semua pihak di seluruh penjuru dunia segera mengirimkan bantuan kemanusiaan. Mengingat warga sipil yang tidak bersalah saat ini sama sekali tidak memiliki tempat berlindung yang aman di Jalur Gaza.

"Dengan adanya pengepungan militer, maka saat ini tidak ada tempat yang memadai," katanya.

Menurutnya, pemboman besar-besaran, hingga pengepungan militer melalui jalur darat dan udara adalah hal yang tidak dapat diterima. Warga sipil menjadi korban hingga tak memiliki tempat aman di wilayah tersebut.

Spoljaric menambahkan agar "kepentingan mendasak segera dilakukan untuk menyelamatkan nyawa". Hal ini menurutnya bisa dilakukan dengan memastikan layanan kesehatan, air, dan listrik, pulih di Gaza.

"Di bawah hukum humaniter internasional, para pihak berkewajiban untuk melindungi warga sipil dari dampak operasi militer setiap saat, untuk membedakan antara sasaran sipil dan militer, dan untuk tidak pernah menggunakan perisai manusia untuk mencegah sasaran militer diserang," kata Spoljaric.

ICRC juga menyerukan agar semua sandera segera dibebaskan. Pihaknya juga menawarkan kembali untuk memfasilitasi operasi pembebasan sandera di masa depan. (cnni/jf)

Jokowi Berpotensi...

Dari Halaman 1

podcast Abraham Samad Speak Up, "Ada empat faktor parlemen (bisa) memakzulkan presiden, jika kita mau belajar dari Amerika latin."

Sebagai catatan, DPR Indonesia kini beranggotakan 575 orang, Kursi DPR diduduki sembilan partai, yakni: PDIP 128 kursi, Golkar 85, Gerindra 78, NasDem 59, PKB 58, Demokrat 54, PKS 50, PAN 44, dan PPP 19 kursi. Syarat utama pemakzulan presiden, disetujui sekurang-kurangnya dua per tiga atau 66,66% anggota Dewan.

Mengacu pada pengelompokan pencapres-cawapres-an 2024, partai-partai mengelompok pada tiga koalisi. Pertama, koalisi pimpinan PDIP (PPP, Hanura, Perindo) men-capres-kan Ganjar Pranowo berduet dengan Maufud Md. Kedua, Koalisi Perubahan (NasDem, PKS, PKB, Partai Ummat, Partai Masyumi) mencapreskan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Ketiga, Koalisi Indonesia Maju (Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, Garuda, Prima, PSI), mencapreskan Prabowo Subianto dengan tandemnya Gibran Rakabuming Raka.

Faktor pertama pemakzulan, menurut Eep, bila terbukti adanya skandal atau penyelewengan kekuasaan yang bisa dibuktikan dan pelakunya langsung presiden.

"Jika (menilik) faktor ini, maka sudah ada alasan pertama. Putusan MK dan pencawapresan Gibran ini bisa didiskusikan sebagai faktor pertama," ungkap aktivis, alumni dan pengajar politik di UI Jakarta, serta lulusan Ohio State University, Amerika, itu.

Skandal pokoknya, presiden menggunakan kekuasaannya, dan muncul nepotisme akut.

Faktor kedua, kegagalan kebijakan yang dirasakan nyata. Eep mengatakan, saat ini hasil-hasil survei meninabobokkan, dengan menyebut kepuasan publik terhadap kerja Jokowi, bagus.

"Ini nanti ada data yang bisa saya sampaikan," lanjutnya.

Menurut catatan KMU, dalam berbagai survei, diantaranya survei Polmark, mencerminkan kepuasan umum terhadap pemerintahan Jokowi yang sudah berjalan, cukup baik, yakni sangat puas 13,2%, puas 60,2% hingga totalnya 73,4%.

Tetapi ketika 38.400 responden di 32 provinsi (1.200 responden per provinsi, minus Papua) ditanya oleh Polmark mengenai hal yang spesifik dan kekinian, jawabannya mengejutkan, kebalikan dari kepuasan secara umum itu. Kesimpulannya, buruk.

Sebanyak 92,6% responden menyebut harga-harga kebutuhan pokok makin tinggi, dan tak terjangkau. Kemudian 89,5% menyebut korupsi yang menyeret banyak pejabat, menyebabkan kehidupan semakin sulit. Lalu, 89,5% mengaku kini sangat sulit mencari pekerjaan. Seterusnya 80,3% mengaku fasilitas kesehatan belum terjangkau, termasuk oleh masyarakat miskin. Terakhir, 76,6% menyebut pembangunan infrastruktur selalu digembar-gemborkan hebat, belum memengaruhi perbaikan hidup.

Faktor ketiga, resistensi (penolakan) parlemen yang melembaga dan kuat, sampai terluas dan tersokong oleh resistensi oposisi dan gerakan sosial.

"Sekarang ini presiden memberikan kekuasaan ke partai politik, dan dia bisa mengendalikan partai. Seakan-akan dia menjadi dewan pembina semua partai," tutur Eep.

Keputusan MK...

Dari Halaman 1

Pengajar hukum kepemiluan dari UI Jakarta, Titi Anggraini SH MH (44) mengakui, putusan MK pada dasarnya bersifat final dan mengikat begitu diucapkan. Adapun putusan MK, hanya dapat dibatalkan dengan putusan MK.

Salah satu presedennya, terjadi MK melalui putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Kata Titi, Sabtu (28/10), "Dalam hal ada bukti kuat yang kemudian diputus MKMK, bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik oleh hakim MK dalam memutus putusan Nomor 90, hal itu bisa menjadi basis dalil permohonan baru untuk membatalkan putusan MK, melalui pengujian baru ke MK, atas konstusionalitas Pasal 169 huruf q (UU Pemilu)."

Anak Jakarta lulusan UI Jakarta dan kini kandidat doktor ini berpendapat, pengimplementasian (penerapan) putusan MK Nomor 90, sulit menganjal langkah putra sulung Presiden Jokowi tersebut. Sejauh ini, satu hal yang dapat menggagalkan pencawapresan Gibran hanya jika KPU menemukan ketidakbenaran dokumen persyaratan yang diajukan saat proses pendaftaran.

Lebih lanjut, Titi mengingatkan, agenda pemilu bukan semata mencoblos surat suara pada 14

Februari 2024, melainkan rangkaian proses pemilihan sejak dimulainya tahapan, termasuk proses pendaftaran.

Oleh karena itu, memilih calon seyogianya tak hanya disandarkan pada gimik (kemasan) atau penampilan artifisial (buatan, tak alami) para calon.

"Pilihlah calon yang dihasilkan dari proses yang kredibel (tepercaya), jujur, dan adil. Bukan produk dari proses yang kontroversial (diperdebatkan) dan penuh benturan kepentingan," pungkask aktivis Perlumud (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) itu.

PASAL 169

Diketahui, Pasal 169 huruf q UU Pemilu, sebelumnya hanya mensyaratkan batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun. Namun lewat uji materi yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Almas Tsaqibbirru Re A, syarat usia minimal 40 tahun kemudian berubah.

Meski masih tetap mematok syarat usia minimal 40 tahun, namun MK menambah norma dalam putusan Nomor 90 dengan kalimat, "Atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah."

Klausul baru itulah yang kemudian digunakan

MKMK Diminta...

Dari Halaman 1

Aktivis dan peneliti ICW (Indonesia Corruption Watch) itu, menjelaskan, putusan MK terkait batas usia minimal telah memberi kesempatan kepada Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Gibran merupakan keponakan dari Ketua MK Anwar Usman, lantas putusan itu sarat konflik kepentingan. Sebab, Hakim Konstitusi tidak bisa memutus perkara yang berkaitan dengan keluarganya sendiri.

ANWAR TAK LAYAK

Kata Kurnia --alumni SMAN 1 Medan, jurusan hukum USU Medan-- bagi para guru besar dan ahli hukum itu, sosok seperti Anwar tidak lagi layak menjadi hakim konstitusi, apalagi Ketua MK.

Sebab, salah satu syarat hakim konstitusi adalah negarawan. Dia harus memahami seluruh peraturan dan juga nilai-nilai etik, berkaitan dengan

pengelolaan konflik kepentingan, dan itu yang saat ini punya permasalahan serius di MK.

Dia pun membantah argumentasi yang pernah disampaikan Anwar, bahwa pengujian UU di MK adalah pengujian yang abstrak, sehingga tidak terkait dengan individu tertentu.

"Bila dicermati, permohonan atau gugatan syarat capres cawapres yang kemudian dikabulkan itu, secara spesifik menyebutkan nama Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka (putra Presiden Jokowi, keponakan Anwar)," tegas advokat anggota PERADI, peraih gelar Bachelor of Laws (LL.B) itu.

Menurut Kurnia, alasan konflik kepentingan yang disampaikan Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arief Hidayat, sudah menggambarkan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang sangat sistematis dan terorganisir.

Hal itu sulit dibantah, karena di dalam MK sendiri terjadi perbedaan pandangan yang sangat tajam. "Karena kita tidak bisa lepaskan putusan itu dibacakan menjelang pendaftaran capres

la menilai, ada degradasi (penurunan) dalam pengelolaan pemerintahan Jokowi di awal terpilih menjadi presiden pada 2014, dengan yang sekarang.

"Dulu, 2014, mau rekrut menteri melibatkan KPK. Makin ke sini...., senang menginjak kaki orang untuk bisa mendalikannya. Seakan-akan... anggota kabinet makin kotor makin bagus. Seperti sistem sandera. Kalau analisis saya ini salah... presiden bisa membantah," tegas Eep.

Dia mengingatkan, jangan terkecoh dengan suasana sekarang seperti sedang baik-baik saja, padahal keropos di dalam.

Katanya, "Bagaimana kalau Bu Mega dan PDI Perjuangan punya kemarahan? Di situ ada PPP sebagai kawan koalisi."

la menambahkan, "Di Koalisi Perubahan ada NasDem, dan PKB, walau ada di kabinet, tapi sudah menyuarkan perubahan."

Satu partai lagi, di luar kabinet, ada PKS.

Faktor keempat, sambung Eep, keresahan publik yang meluas. Kemarahan banyak terpendam.

"Jangan salah. Selama ini banyak silent majority (mayoritas diam) bisa menciptakan perubahan yang dahsyat.

Katanya, "Trump (presiden Amerika saat menjadi petahana) kalah (pemilu) oleh Joe Biden, bukan karena Biden hebat, tapi (kata) rakyat AS enough is enough (cukup, sudah cukup)."

Dia pun mengumpamakan, kalau sampai orang NU --yang jamaahnya se-Indonesia sangat besar, antara 40 juta hingga 100 juta-- menyatakan, "fikih mewajibkan saya berpihak sekarang, (maka) mereka akan berpihak."

la memperingatkan, "Empat faktor ini bukan tidak tersedia. Hati-hati presiden!" (mal/cp/js)

Gibran, masih berusia 36 tahun, maju sebagai bacawapres pendamping capres Prabowo Subianto.

Dokumen persyaratan Gibran serta seluruh bacapres dan bacawapres lainnya --Anies Baswedan/Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo/Mahfud Md-- sendiri, sudah dinyatakan

lengkap oleh KPU, saat mereka didaftarkan oleh gabungan partai politik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, tiga bakal pasangan capres-cawapres itu juga dinyatakan mampu menjalankan tugas sebagai capres-cawapres untuk lima tahun ke depan dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

RUANG UNTUK GANTI

Saat ini, KPU masih memverifikasi administrasi berkas persyaratan para calon. Tahapan itu dilakukan KPU sampai 3 November 2023. KPU pun masih membuka ruang bagi gabungan partai pengusul mengganti bakal calon sampai 8

November 2023.

Oleh karena itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, tiga bakal pasangan capres-cawapres yang ada, belum resmi ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2024. Sebab, masih ada ruang bagi mereka untuk diganti.

"Kalau ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, masih bisa diganti," ujar Hasyim. (mi/cp/js)

Kasus Cacar...

Dari Halaman 1

melalui hubungan seksual Lelaki Seks Lelaki (LSL), munculnya gejala yang tidak biasa dan masih minimnya ketersediaan vaksin MPOx di negara-negara berisiko tinggi.

Lebih dari 90 persen kasus MPOx di dunia dilaporkan pada populasi khusus, yaitu homoseksual dan biseksual.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Dr Moh Adib Khumaidi, melalui Satgas MPOx akan terus mengawal perkembangan kasus MPOx ini di Indonesia.

"Kami terus bersinergi dengan pemerintah untuk memberikan penanganan terbaik bagi para pasien dan masyarakat," katanya dalam keterangan pers, Ahad (29/10).

Laporan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan penyakit Cacar Monyet atau MPOx ini sebagai darurat kesehatan masyarakat global pada Juli 2022. Laporan WHO juga menyebutkan ada kekhawatiran bahwa masalah MPOx ini agak terabaikan di wilayah Asia Tenggara karena kurangnya akses terhadap fasilitas medis yang memadai.

Ketua Satgas MPOx PB IDI, Dr Hanny Nilasari, mengatakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit ini adalah salah satu alasan utama diabaikannya MPOx di Asia Tenggara. Banyak masyarakat yang masih belum mengetahui gejala MPOx dan mungkin tidak tahu cara melindungi diri dari penyakit tersebut.

Kurangnya informasi ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam mencari pertolongan medis, yang dapat berakibat lebih parah. Selain itu, sering terjadi kesalahpahaman mengenai penyakit ini, bahwa MPOx bukanlah penyakit serius atau tidak umum terjadi. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya kepedulian terhadap penyakit ini dan keengganan mengambil tindakan untuk melindungi diri dari infeksi. "Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai gejala-gejala penyakit ini, dan mendidik masyarakat tentang cara melindungi diri dari infeksi, kita dapat mengurangi penyebaran penyakit dan meningkatkan hasil bagi mereka yang terinfeksi," kata Dr Hanny.

Dr Hanny mengingatkan banyak penderita MPOx memiliki gejala ringan, yang mungkin tidak cukup parah sehingga memerlukan perhatian medis. Hal ini dapat mengakibatkan penyakit ini terabaikan, karena orang mungkin berasumsi bahwa gejalanya tidak serius dan akan sembuh dengan sendirinya.

Namun, kasus MPOx yang ringan sekalipun dapat menular dan menyebabkan penyebaran penyakit, serta berakibat fatal terutama pada pasien dengan imunitas rendah. PB IDI juga menilai bahwa perlu dikembangkan penelitian lebih lanjut untuk pengendalian xacar monyet ini. Banyak pemerintah di kawasan Asia Tenggara yang kurang memperhatikan masalah penelitian. Hal ini menyulitkan organisasi layanan kesehatan untuk menerapkan langkah-langkah pengendalian yang efektif dan melakukan penelitian yang diperlukan mengenai pengobatan dan vaksin. Selain itu, MPOx sering kali mendapat prioritas rendah dari berbagai organisasi dan tidak dipandang sebagai isu prioritas dibandingkan penyakit lain, seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, atau malaria. (rep/js)

Dewas KPK...

Dari Halaman 1

pemeriksaan oleh Dewas KPK.

Sebab, menurutnya, hal itu dapat memperlambat gerak Dewas dalam memproses laporan dugaan pelanggaran etik tersebut.

"Padahal SYL sudah diperiksa Dewas sebagai wujud tanggung jawab Dewas menjaga KPK dari perilaku pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan/pegawai KPK," kata Yudi.

Sebelumnya Firlu juga tidak hadir pada panggilan pemeriksaan pertama di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap SYL.

Yudi berharap lima anggota Dewas KPK bisa bersikap tegas dalam memutus sanksi etik demi menyelamatkan muruah KPK.

Terlebih, kata dia, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya telah meningkatkan status kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK, ke tahap penyidikan. "Ketua KPK pun sudah diperiksa sebagai saksi bahkan rumahnya digeledah," sebut Yudi.

Sebelumnya, Ketua KPK Firlu Bahuri meminta agar jadwal pemeriksaannya oleh Dewas KPK diundur menjadi 8 November 2023. Dewas KPK telah mengundang lima pimpinan lembaga antirasuah itu, termasuk Firlu, pada Jumat (27/10). Mereka sedianya dimintai keterangan terkait pertemuan Firlu dengan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan dugaan pemerasan.

Menurut juru bicara KPK, Ali Fikri, permohonan pengunduran jadwal pemeriksaan tersebut diajukan karena Firlu memiliki beberapa kegiatan di Gedung Metro Putih. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail kegiatan yang dimaksud.

"Yang kami ketahui masih ada beberapa agenda lain yang sedang dilakukan di kantor saat ini," kata Ali.

"Sedangkan pimpinan lain, berdasarkan jadwal, pimpinan ada juga yang sedang dinas di luar kota, baik kemarin di Medan, Makassar dan Labuan Bajo," sambungnya. (kps/js)



Hidayah

Hanya Sekejap

Dari Halaman 1

antara pengutusanku dan hari kiamat bagaikan dua jari ini. Kemudian Nabi berisyarat dengan jari tengah dan jari telunjuknya (HR. Muslim).

Al Qodhi, seorang ulama besar mengatakan: "Ini menunjukkan sangat dekatnya kiamat dan diutusnya Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam. Juga menunjukkan bahwa tidak ada jari di antara keduanya dan berarti tidak ada Nabi lagi antara diutusnya beliau shallahu'alaihi wa sallam dan hari kiamat".

Boleh jadi manusia-manusia yang merasa kiamat sangat jauh adalah disebabkan karena terlalu cinta (hubbud) dunia dan panjang angan-angan. Padahal pangkal segala kejahatan adalah terlalu berlebihan cinta terhadap dunia.

Apa yang kita saksikan hari ini adalah banyak manusia yang rakus dan terlalu cinta dunia sehingga melakukan berbagai cara merebut dunia, merebut jabatan, pangkat, dan harta dengan cara-cara yang tidak diridai Allah, atau menghalalkan berbagai cara.

Bila jabatan diserahkan pada manusia yang berwatak cinta dunia tersebut maka dapat dipastikan mereka akan melakukan kezaliman, tidak amanah, dan memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri.

Iman Al Ghazali jauh hari menegaskan, jika engkau mengejar akhirat maka dunia akan ikut, tetapi jika engkau mengejar dunia maka akhirat akan tertinggal. Pandangan Al Ghazali ini mengisyaratkan kita harusnya terlebih dahulu mengejar akhirat, sehingga urusan dunia dengan sendirinya berada di dalam genggaman kita.

Hari ini banyak manusia terjebak dengan dunia yang fatamorgana, yang cenderung mengelabui pandangan mata, seolah-olah indah padahal tidak demikian adanya. Jabatan diperoleh dengan jalan-jalan yang tidak benar, dapat dipastikan akan mendapatkan murka Allah. Watak manusia seperti ini dapat membahayakan dirinya, keluarga dan agamanya, serta masyarakat secara umum.

Ada dua hal yang paling mulia dalam hidup ini tidak ada melebihinya yaitu beriman kepada Allah, dan beramal saleh. Sebab bagaimanapun hidup di dunia ini hanyalah sekejap, jabatan yang kita embanpun juga sekejap bisa jadi sampai 4 tahun, 5 tahun, dan boleh jadi lebih singkat dari itu. Karena itu mari kita tingkatkan iman dan amal saleh. Kitapun tidak tahu seberapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Tetapi yang pasti akhirat adalah tempat yang kekal dan abadi bagi kita hambaNya. Semoga kita mendapat keistimewaan maqom khushnul khotimah dalam kehidupan yang fana dan sima ini. (*)